

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)**

**Oleh :
Dicky Rahman
Pembimbing: Hardi dan Volta Diyanto**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru Indonesia
e-mail : dickyrahman78@yahoo.co.id*

*The Impact of Utilization of Information Technologi, the Application of Region's
Financial Accounting System and Application of the Government Accounting
Standards on the Quality of Region's Financial Reporting
(Empirical Study at Department in Riau Province)*

ABSTRACT

This research aim to analyze the impact of empirical utilization of information technology, the application of region's Financial Accounting System and application of the government accounting standards on the quality of region's financial reporting area in Riau province. Data analysis method used in this research is multiple regression with the help of SPSS Version 20.0. Population in this research is the all of Echelon III and IV Unit in the Riau provincial government amounting to 1063 people. Respondents of this research is some have maintained echelon III and IV in each SKPD(satuan kerja perangkat daerah) Riau Province. Echelon III and IV chosen as respondents with a reason to look at managerial performance in the quality of financial reporting area. Results of this research is the utilization of information technology, Implementation of Region's Financial Accounting System , Implementation of the Government Accounting Standards positive significantly affects the quality of the region's financial reporting can be viewed by $t > t$ table.

Keywords: Information Technology, Accounting, Government, Quality and Reporting.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi ternyata memberikan dampak yang luas terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat (publik). Kondisi ini akan semakin menguatkan tuntutan akuntabilitas atas organisasi

pemerintah. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, terutama akuntabilitas finansial, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi

keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan (Bastian, 2010:297).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat lima opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan dapat diketahui bahwa, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang

belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance government) meningkat.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Hal pertama yang mungkin mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan suatu entitas sektor publik adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh suatu entitas tersebut. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu.

Selain itu, hal kedua yang mendasar mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Bastian (2010: 4) mengungkapkan bahwa jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan.

Hal ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada entitas tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Botutihe (2013) dan Nurhayati (2013) dan menambah variabel pemanfaatan teknologi informasi dari penelitian yang dilakukan Yosefrinaldi (2013), serta mengganti sampel atau objek penelitian pada SKPD Provinsi Riau. Penulis lebih memilih variabel pemanfaatan teknologi informasi karena apabila teknologi informasi yang ada tidak dimanfaatkan oleh pemakainya dengan maksimal, maka akan menjadi faktor kurang berkualitaskannya laporan keuangan. Alasan penulis mengangkat judul ini kembali selain untuk menguji konsistensi hasil penelitian terdahulu juga untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Perangkat SKPD secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada

Pemerintah Provinsi Riau? 2) Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Perangkat SKPD secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau? 3) Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Perangkat SKPD secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk memberikan bukti empiris bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Perangkat SKPD secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau. 2) Untuk memberikan bukti empiris bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Perangkat SKPD secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau. 3) Untuk memberikan bukti empiris bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada perangkat SKPD secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau.

TELAAH PUSTAKA

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi merupakan sisi supply dari kebutuhan akan sarana pengolahan data dan komunikasi yang cepat dan murah (Hariningsih, 2005:4). Sedangkan menurut Simarmata (2006:2), teknologi dapat dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan suatu produk yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan peralatan, proses dan sumber daya.

Teknologi informasi mengacu pada suatu item yang bermacam-macam dan kemampuan yang digunakan dalam pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran data serta informasi. Komponen utamanya ada tiga yaitu komputer, komunikasi dan keterampilan (Simarmata, 2006:3).

Pemanfaatan Teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000 dalam Yosefrinaldi, 2012). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.

Penerepan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 juga dijelaskan Bahwa sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai, serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Halim, (2012: 84) Menjelaskan sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, dan akuntansi asset.

Menurut PP 71 tahun 2010, laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah :

- a. Neraca
- b. Laporan Realisasi Anggaran dan,
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan
- e. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- f. Laporan operasional
- g. Laporan perubahan ekuitas

Penerepan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

SAP Berbasis Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (PP No 71 tahun 2010).

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa SAP diperlukan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan untuk merencanakan biaya-biaya yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, serta memprediksi kondisi ekonomi setelah kegiatan pemerintahan dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan memuat dua belas pernyataan, yaitu:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:61). Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006:121). Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pejabat Eselon III dan IV Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Riau yang berjumlah 1063 orang. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Riau berjumlah

40 SKPD. Untuk penelitian ini akan dilakukan pada seluruh SKPD pemerintah Provinsi Riau. Alasan penulis memilih keseluruhan SKPD adalah untuk memperluas jawaban terhadap apa yang akan diteliti. Responden dari penelitian ini adalah seagian pejabat eselon III dan IV di setiap SKPD Provinsi Riau. Pejabat eselon III dan IV dipilih sebagai responden dengan alasan untuk melihat kinerja manajerial dalam kualitas laporan keuangan daerah. Dari setiap SKPD akan diambil 3 responden, sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 120 responden.

Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber ahli. Kuisiner dalam penelitian ini mengacu pada kuisisioner penelitian sebelumnya yaitu diambil dari penelitian As Syifa Nurillah (2014) dan Riany Nurhayati (2013). Seluruh Variabel dalam penelitian ini diukur dengan skala likert 1-5 yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS= Sangat Setuju), skor 4 (S= Setuju), skor 3 (N= Netral), skor 2 (TS= Tidak Setuju), dan skor 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang adalah Penelitian Lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan cara memberikan surat yang berisikan pernyataan kepada instansi terkait melalui peninjauan secara langsung.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda (*multiple regression*) dengan bantuan komputer melalui program SPSS 20.0 *for Windows*.

Adapun uji yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Statistik Deskriptif, Uji statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data. Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai data melalui rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum.
- 2) Uji Kualitas Data, uji kualitas data digunakan untuk menentukan apakah data yang diperoleh dikatakan sesuai. Uji kualitas data dalam penelitian ini terbagi 2 yaitu:
 - a) Uji reliabilitas, Menurut Ghozali (2013:47), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
 - b) Uji Validitas, Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52).
- 3) Uji Asumsi Klasik, uji asumsi klasik dalam penelitian ini ada 3 yaitu:
 - a) Uji Normalitas, Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak (Ghozali, 2013:160).
 - b) Uji Multikolinearitas, Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen).
 - c) Uji Heteroskedastisitas, Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.
- 4) Uji Model, terdiri dari:
 - a) Uji Koefisien Determinasi, Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya (Ghozali 2011 dalam Zaliarti 2013).
 - b) Uji Hipotesis, Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali 2011 dalam Zaliarti 2013). Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - c) Uji Analisis Regresi Berganda, Analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel Independennya minimal 2. Bentuk umum persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut:

$$KLKD = a + b_1PTI + b_2PSAKD + b_3PSAP + e$$

Keterangan:

A = Konstanta

b_{1,2,3} = Koefisien Regresi Parsial

e = Variabel Pengganggu (error)

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

PSAKD = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

PSAP = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

KLKD = Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sedangkan variabel dependen adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Untuk lebih jelas, masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut :

Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Variabel dependen dalam Penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang dimiliki laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010). Karakteristik kualitatif tersebut adalah Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Variabel kualitas laporan keuangan daerah ini akan diukur

dengan instrumen yang dikembangkan dalam penelitian Nurillah (2014), dengan 8 item pernyataan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₁)

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Pemanfaatan Teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al , 2000 dalam Yosefrinaldi , 2012). Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan instrumen yang digunakan dalam penelitian Nurillah (2014), dengan 6 item pernyataan.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂)

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengelolaan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002). Menurut Halim (2012:56) sistem akuntansi pemerintah daerah adalah Serangkaian

sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan.

Variabel Penerapan sistim akuntansi keuangan daerah ini diukur dengan instrument yang digunakan dalam penelitian Nurillah (2014) dengan 8 item pernyataan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X₃)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual.

Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan ini diukur dengan instrument yang digunakan dalam penelitian Nurhayati (2013) dengan 15 item pernyataan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembalian Kuisisioner

Kuisisioner diberikan kepada 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau. Masing-masing SKPD diberikan tiga kuisisioner kepada bagian keuangan. Jumlah kuisisioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 105 buah dengan tingkat respon 87,5 %. Semua total kuisisioner dapat digunakan karena telah sesuai dengan yang diinginkan penulis. Tingkat pengembalian kuisisioner dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah sampel dan Tingkat pengembalian kuisisioner

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuisisioner yang disebar	120	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	(12)	10
Kuisisioner yang tidak dapat dianalisis	(3)	2,5
Kuisisioner yang dapat dianalisis	105	87,5

Sumber: Data olahan

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa kuisisioner yang disebar berjumlah 120 kuisisioner, sedangkan yang bisa dianalisis adalah 105 kuisisioner.

Hasil Statistik Deskriptive

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standart deviation (simpangan baku) data yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 2
Statistik Deskriptive

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
KLKD	105	24,00	40,00	33,4762	3,70316
PTI	105	17,00	30,00	24,7714	3,01042
PSAKD	105	19,00	40,00	33,3714	3,53351
PSAP	105	52,00	73,00	62,6381	4,44437
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel 2 diatas, semua variabel yaitu pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan disajikan dalam bentuk *descriptive statistic* yang menunjukkan

nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan juga standar deviasi.

Hasil Pengujian Kualitas Data Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df)= n-2 dengan alpha 0.05, n adalah jumlah sampel. Dalam penelitian ini df= n-2 (105-2)=103 sehingga didapat r tabel untuk df 103 adalah 0,1918. Berdasarkan hasil uji validitas di atas dapat dilihat bahwa r hitung > r tabel maka keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian realibitas atau keandalan instrument dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Batasan minimum adalah 0,6. Variabel dikatakan reliable jika nilai *cronbach alpha* > 0,6.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Batas Reliabilitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,809
Penerapan Sistim Akuntansi Keuangan Daerah	0,726
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	0,753
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	0,800

Sumber : Data Olahan SPSS

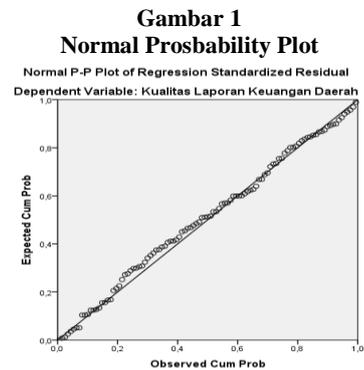
Berdasarkan tabel 3 diatas, semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable, karena diketahui bahwa nilai *cronbach alpha* keseluruhan variabel > 0,6.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi yang normal.

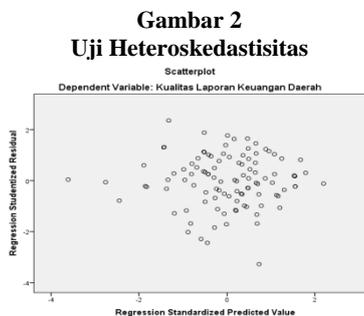


Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan gambar 1 diatas, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mendekati garis diagonal. Maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan gambar 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan kata lain terjadi kesamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kesimpulan ini diperoleh dengan melihat penyebaran titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun

dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Hasil Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Tabel 4
Uji Gejala Multikoleniaritas

No	Variabel	Tolerance	VIF
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,886	1,128
2	Penerapan sistem Akuntansi Keuangan daerah	0,837	1,194
3	Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan	0,896	1,116

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, nilai tolerance yang dihasilkan berkisar antara 0,1 sampai 1,0 dan nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai diantara 1 sampai 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikoleniaritas antar variabel independen.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 5
Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-5,820	4,037		-1,442	,153
PTI	,210	,091	,170	2,310	,023
PSAKD	,448	,080	,427	5,628	,000
PSAP	,306	,061	,367	5,008	,000

Sumber: Data Olahan SPSS

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variable independen dan dependen.

Dari tabel 5 didapatkan bahwa:

$$KLKD = \alpha + \beta_1 PTI + \beta_2 PSAKD + \beta_3 PSAP + e$$

Keterangan :

KLKD = Kualitas Laporan Keuangan Daerah

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

PSAKD = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

PSAP = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi

e = Error

Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil perhitungan maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KLKD = -5,820 + 0,210PTI + 0,448PSAKD + 0,306PSAP + e$$

Berdasarkan persamaan di atas maka pemanfaatan teknologi informasi memiliki tingkat pengaruh sebesar 0,210, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebesar 0,448, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,306. Artinya jika pemanfaatan teknologi berubah sebesar 1 satuan misalnya, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,210 satuan. Model regresi ini mempunyai konstanta sebesar -5,820, yang artinya jika pemanfaatan teknologi informasi, sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah memiliki nilai nol (konstan) maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat sebesar -5,820 satuan.

Untuk menguji signifikansi koefisien regresi digunakan uji-t, sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya maka diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Pengujian Hipotesis Pertama (H₁)

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah 2,310 dan t tabel adalah 1,984 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung > t tabel dan P value < α , maka H₁ diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,023 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau. Sehingga hipotesis pertama (H₁) dapat dibuktikan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Nurillah (2014) yang mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah kota Depok.

Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah 5,628 dan t tabel adalah 1,984 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung > t tabel dan P value < α , maka H₀ ditolak dan H₂ diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau. Sehingga hipotesis kedua (H₂) dapat dibuktikan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Botutihe (2013) yang menyatakan

bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung variabel sistem akuntansi pemerintah adalah 5,008 dan t tabel adalah 1,984 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung > t table dan P value < α , maka H₀ ditolak dan H₃ diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti SAP memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga hipotesis ketiga (H₃) dapat dibuktikan atau dengan kata lain H₃ diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2013) yang menyatakan bahwa SAP berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adj. R²)

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berikut akan dijelaskan dalam bentuk tabel.

Tabel 6
Hasil uji koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,716 ^a	,513	,499	2,62192

Sumber: Data olahan SPSS

Berdasarkan tabel 6 diatas, tingkat koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar Adj. R²=

0,499. Hal ini berarti kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau dipengaruhi oleh variabel pemanfaatan teknologi informasi, sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah sebesar 49,9%. Sementara sekitar 50,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kualitas laporan keuangan dipengaruhi pemanfaatan teknologi informasi, system akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah. Tingkat Adj. R^2 yang diperoleh tergolong tinggi, hal ini disebabkan karena dari 3 variabel yang diteliti ternyata seluruh variabel berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, selain itu pengaruh masing-masing variabel independen juga tergolong tinggi. Variabel yang paling dominan adalah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebesar 0,448 disusul kemudian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,306.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_1), penerapan sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Riau. Pengaruh variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_1), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Riau adalah sebesar 0,499 atau 49,9%. Sedangkan sisanya sebesar 50,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Tingginya pengaruh ketiga variabel

tersebut karena dari tiga variabel yang diteliti ketiga variabel berpengaruh kuat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Riau.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (X_1) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurillah (2014) yang juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Botutihe (2013) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X_3) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2013) yang menyatakan bahwa SAP berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Begitu juga Lasoma (2013) yang menyatakan bahwa

penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Kabupaten Gorontalo Utara juga berpengaruh signifikan terhadap terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- 1) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau. Dimana, semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau .
- 2) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau. Dimana, semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau.
- 3) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau. Dimana, semakin tinggi penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau.

Keterbatasan Penelitian

- 1) Dalam penelitian ini, penggunaan kuisisioner sebagian besar masih menggunakan kuisisioner yang dipakai peneliti sebelumnya, sehingga kemungkinan terjadinya

kekeliruan dalam pengukurannya karena belum tentu menggambarkan keadaan yang sama pada objek peneliti sebelumnya.

- 2) Penelitian ini hanya menggunakan obyek penelitian satuan kerja perangkat daerah dalam satu daerah sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pemanfaatan teknologi informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Riau.
- 3) Karena memiliki banyak kesibukan dan keterbatasan waktu, responden meminta kuisisionernya ditinggalkan yang berdampak pada peneliti tidak bisa mendampingi responden pada saat menjawab. Akibatnya jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- 4) Penelitian ini hanya menggunakan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Riau.

Saran

- 1) Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan menambahkan variabel lain seperti sarana dan prasarana, komitmen pegawai, kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, sistem pengendalian internal dan lain sebagainya.
- 2) Setiap satuan kerja hendaknya memiliki teknologi informasi yang

- baik dalam menjalankan tugas-tugas terutama dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan karena berdasarkan hasil penelitian kebanyakan pegawai yang menjadi responden penelitian mengeluhkan masalah kurangnya pemahaman tentang sistim akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya hendaknya membuat kuisisioner yang baru dan disesuaikan dengan kondisi daerah yang diteliti sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang sebenarnya.
 - 4) Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan metode lain selain kuisisioner seperti wawancara langsung sehingga peneliti dapat meyakini jawaban yang diberikan responden menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi ketiga: Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Botutihe, Tutun Hermawanto. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Gorontalo*. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro:Semarang.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi keempat*, Salemba empat, Jakarta.
- Hariningsih. 2005. *Teknologi Informasi*. Graha Ilmu:Yogyakarta.
- Kepmendagri No 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.
- Lasoma, Vicky Agustiawan. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo.
- Nurhayati, Riani. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Nurillah, As Syifa. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistim Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap*

- Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Diponegoro.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis.* Jilid 2. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.
- Simarmata, Janner. 2006. *Pengenalan Teknologi Komputer dan Indormasi.* Andi: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta.
- Yosefrinaldi. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.* Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Negeri Padang.
- Zaliarti. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Muria Kudus.